

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengusaha yang menjadi politisi adalah fenomena yang bukan hal baru lagi terjadi di Negara Indonesia, transformasi politik dari pengusaha menjadi politisi sudah terjadi sejak lama, dimana pengusaha yang memiliki pandangan, kemampuan, latarbelakang ilmu politik yang mumpuni, power ekonomi serta relasi terhadap dunia politik dapat dengan mudah terjun menjadi seorang politisi. seorang pengusaha terikat erat juga dengan yang namanya bisnis, dan bisnis juga dapat mendukung kegiatan politik untuk mempertahankan suatu kedaulatan Negara, tidak heran jika kita melihat banyak para pelaku bisnis atau pengusaha ini sangat dekat dengan dunia politik dan tidak jarang ada juga yang terjun langsung menjadi seorang politisi. Hubungan antara politik dan bisnis memang tidak dapat dipisahkan karena faktanya konteks politik ini sebagai pengusaha adalah ladang bagi mereka untuk memperoleh keuntungan bisnis, jadi perubahan atau transformasi profesi dari seorang pengusaha yang menjadi politisi adalah hal yang wajar karena kekuasaan yang diperoleh dari politik bisa berdampak pula kepada kepentingan bisnis para pengusaha. <sup>1</sup>

Idealnya ranah politik dan bisnis merupakan dua hal yang berbeda. Artinya dua ranah ini bergerak dalam ruang yang berbeda dengan orientasi yang berbeda pula. Politik berorientasi pada segala tata cara yang bertujuan meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Sementara ranah bisnis berorientasi pada profit secara materiil atau keuntungan ekonomi. Namun, dalam beberapa titik pada nyatanya keduanya bersinggungan satu dengan yang lainnya. Perkembangan jaman yang semakin dinamis menjadikan garis batas antara keduanya menjadi kabur. Dari jaman terdahulu politik dan pengusaha sudah saling berkaitan, sejak jaman Orde Baru atau pemerintahan Soeharto politik dan pengusaha sudah saling

---

<sup>1</sup> <https://republika.co.id/berita/nmw94f23/saat-pengusaha-berpolitik>

berkaitan satu sama lain, transformasi ini terjadi sejak jaman Orde Baru, hal ini terjadi karena adanya suatu keuntungan yang bisa di dapat dari segi pengusaha. Pengusaha sendiri tentu melihat peluang yang sangat menjanjikan, sehingga mereka beramai-ramai untuk bertransformasi menjadi politisi, dari segi ekonomi tentu akan berkembang jika pengusaha menjadi politisi, sejak jaman Orde Baru pengusaha sudah memulai bertransformasi menjadi politisi, dan sampai saat ini, pengusaha menjadi politisi semakin banyak dan sudah menjadi rutinitas yang wajar bagi dunia politik. dua hal antara politik dan pengusaha sudah menjadi satu yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Fenomena tentang transformasi tersebut sudah bisa dilihat sejak jaman orde baru sampai sekarang. Karena hal ini sudah menjadi kewajaran bagi dunia politik.

Menjadi pengusaha yang sukses secara tidak langsung bisa turut berkontribusi dalam pembangunan negaranya, apalagi dalam segi ekonomi. Ditambah dengan nilai karakternya yang selalu berorientasi ke depan dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi.

“Hal ini sudah berlangsung sejak Orde Lama hingga saat sekarang ini. Tidak hanya di pusat, hubungan antara pengusaha dengan dunia politik juga merambah sampai ke daerah. sekalipun, hubungan antara penguasa (politisi) dengan pemilik modal (pengusaha) sangat umum terjadi. Hubungan ini biasanya terkait dengan masalah finansial atau pendanaan salah seorang calon saat kampanye. Namun persoalan datang justru pasca kampanye tersebut. Ada semacam jebakan balas jasa<sup>2</sup> bagi pemodal atau pengusaha yang sebelumnya mendanai kampanye kepala daerah terpilih berupa keleluasaan melaksanakan bisnis dan proyek-proyek yang berhubungan dengan kendaraan modalnya (perusahaan).<sup>2</sup>”

“Inilah sebuah simbiosis mutualisme yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi bahan perdebatan. Saat banyaknya elit partai politik yang tersangkut

---

<sup>2</sup> Suryo Hening. 2014. Konspirasi Bisnis (Pengusaha) Dalam Politik Praktis. Jurnal. Transformasi. 1(26): 1-51.

kasus korupsi, negeri ini dikejutkan dengan kemunculan beberapa pengusaha sukses nasional yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Era tersebut sebenarnya telah dimulai sejak lama, Jokowi sebelum memutuskan terjun ke politik adalah seorang pengusaha. Selain itu ada Hary Tanoesoedibjo, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla dan masih banyak nama-nama tenar lainnya yang terjun ke politik.<sup>3</sup> Kesadaran ini tentu dianggap sebagai angin segar untuk memberi ragam pilihan dan peluang lebih banyak untuk menggerakkan roda kemajuan bangsa, jika selama ini bangsa berjalan dengan satu mesin yang dimonopoli oleh orang-orang yang besar dan tumbuh dalam didikan politik tulen, maka saat ini ada motor baru yang dimunculkan oleh para pengusaha.

Penelitian yang membahas mengenai motivasi pengusaha dalam kontestasi politik juga sudah banyak oleh beberapa orang, salah satunya adalah penelitian dari Nur Satya (2013). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seseorang kadidatan memiliki dua kriteria ketika mengikuti kontestasi politik, yang pertama adalah. Motivasi ekonomi menjadi salah satu faktor untuk dijadikan pertimbangan ketika membuat kebijakan harus melihat untung dan ruginya. Motivasi politik cenderung untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang dibuat. Selain itu penelitian dari Izzatun Nikmah (2016). Hasil dari penelitian tersebut partai PDIP memberikan rekomendasi kepada para pengusaha yang memiliki peluang lebih besar dari pada yang bukan pengusaha, motivasi caleg yaitu meliputi dorongan dari partai, motivasi personal, dorongan masyarakat serta orang – orang terdekat. Contoh lain seperti penelitian dari M. Ali Azhar (2012). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa perpindahan para pengusaha menjadi seorang penguasa adalah sebuah pilihan yang rasional karena dianggap dengan modal ekonomi yang telah cukup mereka, tidak mencari untung dari kekuasaan yang dimiliki, tetapi dari sudut pandang negatif dengan gelontoran uang ketika proses pemilihan dilakukan bahwa pengusaha tersebut akan mencoba mencari keuntungan dari kekuasaan yang dimiliki.

---

<sup>3</sup> ibid

### **Motivasi Politik Para Pengusaha**

“Motivasi merupakan energi dorongan yang tersedia yang akan dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan/dorongan dari kebutuhan individu dan situasi serta peluang yang tersedia. Selain itu motivasi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku dalam melakukan sesuatu, sehingga mencapai hasil dan tujuan Mc. Clelland (1961). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu usaha yang bersumber pada energi yang ada di dalam diri manusia yang akan dilepaskan dan dikembangkan secara sadar untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku individu untuk melakukan sesuatu.<sup>4</sup>”

Banyak hal yang dapat mempengaruhi transformasi pengusaha menjadi politisi ini, dari segi motivasi sendiri bisa bermacam-macam seperti halnya, dari dorongan keluarga lingkungan sekitar, orang-orang terdekat, partai, dan dari segi tujuan tentunya setiap individu memiliki tujuan yang berbeda-beda, pengusaha dan politik sendiri tidak dapat dipisahkan, di Indonesia sendiri sudah banyak para pengusaha- pengusaha yang masuk ke dunia politik, tentu dalam hal ini para pengusaha-pengusaha tersebut memiliki tujuan-tujuan tertentu sesuai keinginan para pengusaha tersebut. Tidak hanya di partai-partai besar, partai-partai kecilpun banyak dihuni oleh para pengusaha-pengusaha, fenomena ini telah terjadi sejak era orde baru, hubungan para pengusaha dan pemerintahan sangat dekat sekali, seperti halnya memiliki ketergantungan satu sama lain, di DPRD Kota Surabaya sendiri ada beberapa pengusaha yang telah menjadi politisi, tidak hanya di DPRD kota Surabaya saja, tapi di partai-partai pun juga ada para pengusaha-pengusaha. Seperti halnya Keinginan mengabdikan pada Bangsa dan Negara Indonesia dari Vinsensius Awey ternyata sangat kuat. Ini setelah Vinsensius sebagai seorang warga keturunan etnis Tionghoa terpilih menjadi anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

---

<sup>4</sup> Dimas Alfarizi Mustiko Aji, Pengusaha dan Politik: Studi Motivasi Pengusaha Mengikuti Pemilu Legislatif di Kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2019

Bagi salah satu DPRD Kota Surabaya, mengabdikan kepada Bangsa dan Negara sebagai keinginan yang sebenarnya diimpikan sejak lama. Pernah menjadi pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) tersebut seringkali berurusan dengan persoalan politik. Ini setelah Vinsensius termasuk bagian dari kelompok Cipayung penggerak reformasi bersama sejumlah tokoh mahasiswa lain seperti Anas Urbaningrum dan Muhaimin Iskandar. Tidak hanya di jajaran DPR atau DPRD saja. Para pengusaha juga berada di setiap partai-partai. Partai adalah salah satu faktor dalam masuknya para pengusaha ke dunia politik, oleh karena itu hubungan antara pengusaha dan politik sudah sangat melekat, dilihat dari segi politik, para pengusaha tentunya memiliki tujuan-tujuan tersendiri dalam berpartisipasi di dunia politik. Selain mengabdikan diri kepada negara adapun tujuan lain yang dapat dicapai.

Sejak dulu telah tercatat bahwa hubungan antar pengusaha dan politik saling keterkaitan satu sama lain, kerjasama antara pengusaha dengan penguasa di negeri ini telah menghasilkan kebijakan yang di antaranya adalah dorongan atas pertumbuhan dunia usaha pribumi yang tercermin dalam kebijakan “Ali Baba atau Baba Ali pada tahun 1950-an. Yahya Muhaimin menyebutnya sebagai *Client Businessmen*, dimana pengusaha-pengusaha bekerja dengan dukungan dan proteksi dari jaringan kekuasaan pemerintahan.<sup>5</sup>”

Dengan kata lain selama oligarki masih memiliki sumber daya yang cukup mereka akan tetap ada meskipun rezim berganti seperti kondisi saat ini. Kondisi ini terbukti ketika pasca reformasi 1998 dimana panggung politik kita pada level nasional. Dari hasil studinya, Winters berhasil memetakan beberapa politisi yang menguasai bisnis khususnya bisnis dibidang media dan bisnis-bisnis lainnya. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

---

<sup>5</sup> Yahya Muhaimin 1991. *Bisnis Dan Politik*. Jakarta :LP3S hal: 152

**Tabel. 1 Contoh pengusaha menjadi politisi**

Pengusaha	Pendukung Oligarki	Media	Perusahaan	Afiliasi Partai Politik
Aburizal Bakrie	Sendiri	TVOne, ANTV, Visi Media Asia, VivaNews.com	Bakrie Group	Golkar
Oesman Septa Odang	Sendiri	-	OSO Group	Hanura
Surya Paloh	Sendiri	Metro Tv, Media Indonesia	Papandayan Hotel, Bali Intercontinental Hotel, Seraton Media Hotel, PT.Surya Persindo, Dll	Nasdem
Djan Faridz	Sendiri	-	PT Dizamatra Powerindo	PPP
Jusuf Kalla	Sendiri	-	Kalla Group: Pt. Bumi Karsa, Pt. Bumi Sarana	Golkar

			Utama, Pt. Kalla	
Sandiaga Uno	Sendiri	-	Pt. Saritoga	Gerindra
Joko Widodo	Luhut Pandjaitan	-	Pt. Toba Sejahtera	Pdip

Sumber : Jeffry Winters, *Oligarchy And Democracy In Indonesia* Dalam Michele Ford Dan Thomas B, Pepinsky (Ed), *Beyond Oligarchy*, 2014

Nama-nama yang tertulis dalam tabel tersebut adalah mereka yang beberapa politisi yang berasal dari kalangan pengusaha yang kerap kali kita jumpai pada kertas suara pemilu presiden. Fakta ini semakin menguatkan argumen bahwa dunia politik kita sangat erat dengan pengusaha. Bahkan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dimenangkan oleh pasangan pengusaha Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sebelum hijrah dalam dunia politik, Jokowi adalah pengusaha furniture/mebel asal Kota Solo. Sementara Jusuf Kalla adalah pengusaha sukses dari Sulawesi yang memiliki jaringan perusahaan yang besar di berbagai daerah Indonesia. Selain itu, pengusaha juga banyak ditemui pada lembaga legislatif. Beritamometer (3 oktober 2015) Tercatat sebesar 44,6% anggota DPR RI berlatar belakang sebagai pengusaha.

Fenomena berbondong-bondongnya kaum pengusaha tampil di gelanggang politik, baik maju sebagai kontestan maupun sekedar partisan dukungan politik, mendapatkan respons publik yang beragam. Di antara respons itu adalah mempersoalkan munculnya kontroversi dari fungsi politik itu sendiri. Kelompok pengusaha yang berperan ganda sebagai pengambil kebijakan atau politisi. penyalagunaan fungsi politik tersebut dipersoalkan karena akan serta merta lebih banyak mendatangkan madharat ketimbang masalah. Asumsi yang digunakannya bahwa pengusaha berkecenderungan selalu memposisikan diri sebagai pemburu keuntungan (*profit seeking*), sementara posisi pejabat publik adalah untuk kemaslahatan bangsa (Mustofa Muchdor, 2006). Hal berikutnya yang

menjadi titik persoalan adalah bahwa pengusaha itu dikatakan binatang ekonomi (*economic animals*). Aktivasnya mengakumulasi modal dengan tujuan utama mencari keuntungan. Oleh karena itu, apa jadinya jika pengusaha menjadi pengambil kebijakan

*Trend* ini juga didorong oleh pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang memberi ruang yang luas bagi hubungan timbal balik antara kepentingan pengusaha dan penguasa di daerah. Di dalam dunia politik sosok pengusaha sangat erat sekali hubungannya dengan dunia perpolitikan, karena dari segi kekuatan untuk meraih kemenangan. Keputusan KPU RI No 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Surabaya dalam Pemilu Tahun 2019 hanya terdapat 50 kursi yang tersebar dalam 5 daerah pemilihan, yakni

1. 10 kursi untuk dapil 1 meliputi Kecamatan Bubutan, Genteng, Gubeng, Krembangan, Simokerto, Tegalsari;
2. 11 kursi untuk dapil 2 Kecamatan Kenjeran, Pabean Cantikan, Semampir, Tambaksari;
3. 9 kursi untuk dapil 3 Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggiling Mejoyo, Wonocolo;
4. 10 kursi untuk dapil 4 Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal, Wonokromo;
5. 10 kursi untuk dapil 5 Kecamatan Asemrowo, Benowo, Dukuhpakis, Karangpilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Tandes, Wiyung.

Dengan terbatasnya jumlah kursi yang diperebutkan serta dengan pemecahan menjadi 5 wilayah, membuat para calon anggota dewan terhormat harus bersaing sangat ketat. Meskipun hal itu disadari oleh para politisi yang berlatarbelakang sebagai pengusaha, mereka tetap optimis dengan perolehan suara yang akan mereka peroleh. Posisi mereka sebagai caleg pengusaha dirasa mampu membantu mereka dalam proses pencalonan, karena mereka

mempunyai keunggulan secara financial yang lebih besar. Dengan kondisi system politik indonesia yang dianut saat ini mengakibatkan biaya politik yang semakin mahal. Caleg dituntut untuk meraih popularitas dan elektabilitas yang tinggi untuk memenangkan kontestasi 5 tahunan ini. Serangkaian proses seleksi yang dilalui oleh caleg pengusaha ini menggambarkan caleg pengusaha yang diunggulkan harus mampu dari segi financial dan dan juga harus mempunyai modal social serta politik agar dapat terpilih oleh parta yang akan mengusung mereka dalam pemilu legislative, sehingga peluang untuk terpilih sebagai anggota dewan semakin besar.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas yang menyatakan maraknya pengusaha yang bertransformasi menjadi politisi, maka terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses transformasi dari pengusaha menjadi politisi?
2. Apa tujuan transformasi dari pengusaha menjadi politisi?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui, memahami, dari dampak pengusaha dalam bertransformasi menjadi politisi dalam proses politik di DPRD Surabaya
2. Mengetahui, memahami dan menganalisa tahap-tahap dari transformasi pengusaha menjadi politisi

#### **I.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi transformasi pengusaha menjadi politisi.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya mengenai transformasi pengusaha menjadi politisi.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori mengenai keterkaitannya politik dan ekonomi yang di dapatkan dibangku perkuliahan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **I.5. Kerangka Konseptual dan Teori**

##### **1.5.1 Motivasi**

Motivasi merupakan suatu keinginan yang keluar dari dalam tubuh dan biasanya berupa energy yang dimana akan dilepaskan dan melalui proses perkembangan tergantung pada power atau dorongan dari kebutuhan individu itu sendiri, dan juga situasi serta peluang yang tersedia. Selain itu motivasi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku dalam melakukan sesuatu, sehingga mencapai hasil dan tujuan Mc. Clelland (1961). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu usaha yang bersumber pada energi yang ada di dalam diri manusia yang akan dilepaskan dan dikembangkan secara sadar untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku individu untuk melakukan sesuatu.<sup>6</sup>

a. Motivasi intristik

---

<sup>6</sup> Mclelland, David. 1961. *Human Motivaation Theory*. Diakses dari <https://managementmania.com/>

Adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri seseorang. Motivasi ini dapat muncul tanpa pengaruh apapun dari luar. Dalam diri seseorang yang termotivasi secara intristik ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya (taufik,2007)<sup>7</sup> yaitu:

-Kebutuhan

Seseorang yang melakukan suatu aktivitas maupun kegiatan disebabkan oleh adanya suatu kebutuhan secara biologis ataupun psikologis. Seseorang termotivasi untuk menjadi calon legislatif dikarenakan adanya kebutuhan secara biologis ataupun psikologis seperti contoh ingin meningkatkan nilai dirinya

-Harapan

Seseorang termotivasi dikarenakan adanya harapan dan keberhasilan demi kepuasan dalam diri seseorang. Lalu kepuasan dalam diri seseorang ini mencerminkan tercapainya tujuan. Termotivasi untuk menjadi calon legislatif, dengan harapan dapat memenangkan kursi anggota dewan legislatif.

-Minat

Seseorang mempunyai rasa suka dan keinginan terhadap suatu hal, sering kali tanpa dorongan dari orang lain melainkan dorongan dari dalam dirinya sendiri

b. Motivasi ekstrinsik

Adalah motivasi yang datang dan dipengaruhi oleh lingkungan atas dari luar dirinya. Motivasi secara ekstrinsik berarti seseorang termotivasi dikarenakan dirinya. Motivasi secara akademik berarti seseorang termotivasi dikarenakan ada pemicu yang berasal dari luar dirinya. Pemicu ini terdapat berbagai macam bentuknya, bisa uang,bonus,haidah,pujuian,jabatan,dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya motivasi secara ekstrinsik yaitu:

-Dorongan Keluarga

-Lingkungan

---

<sup>7</sup> Taufik. 2007. Psikologi Komunikasi. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung

-Imbalan

### 1.5.2 Partisipasi Politik

Munculnya sebuah partisipasi tidaklah terlepas juga dari munculnya pembangunan ada beberapa aspek juga yang membuat kelompok kelompok mengapa melakukan partisipasi pertama, partisipasi politik muncul karena posisi status sosialekonomi.mereka yang mempunyai sosio ekonomi yang tinggi mempunyai pertimbangan rasional dalam melakukan partisipasi. Kedua ,dalam sebuah pembangunan tentu tidak terlepas dari tekanan tekanan antar kelompok yang saling mengancam satu dengan lainnya. Ketiga, semakin kompleksnya pembangunan membuat lrahirnya kelompok kelompok yang terlibat dalam pembangunan. Keempa<sup>32</sup>et pembangunan merupakan sebuahg tindakan tersebut, pasti juga melibatkan kelompok kelompok yang ada disekitarnya. Kelima sebuah modernisasi sosio-ekonomi membuat kelompok mengabaikan perbedaan dengan yang lain Dalam buku Huntington juga menjelaskan bagaimana peran kelompok dalam membuat program-program dalam membuat pembangunan ,dimana tujuannya adalah melakukan penataan agar dapat menarik partisipasi masyarakat minoritas. Selain ada beberapa aspek yang sebenarnya mengandung tujuan kelompok dalam mencapai sebuah keinginan ketika pembuatan program tersebut.

Artinya ada sebuah maksud yang memang benar benar dituju oleh kelompok kelompok ketika realisasi. Karena pada moment tersebut juga adalah panggung bagaimana kelompok bisa mendapatkan simpati dari para kelompok lainnya. Berjalanya sistem negara demokrasi negara dengan suatu ketergantungan terutama di negara negara berkembang dan ketergantungan inilah yang biasanya digunakan oleh para elit pada negara berkembang untuk mempengaruhi masyarakat dibawah agar mendapatkan sebuah legitimasi yang dapat digunakan sebagai modal untuk mensukseskan pencapaian sebuah kekuasaan. Faktor kedekatan organisasi, ekonomi, dan juga keterbatasan informasi di negara berkembang membuat jarak yangbegitu jauh antara elit dan masa. Sehingga tak jarang suatu bentuk program program di negara demokrasi banyak yang diarahkan

kepada kelompok tertentu. Mobilisasi organisasi dan partisipasi merupakan sebuah kondisi bagaimana kondisi ditingkat mikro tentang partisipasi politik. Dimana banyak sekali aspek yang mempengaruhi mulai dari status sosial bagaimana kondisi pada masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh strata sosial.<sup>8</sup> Ikatan kekerabatan sampai posisi keagamaan, oleh karenanya banyak dijumpai keturunan keluarga bangsawan selalu dipertimbangkan pada proses pemilihan demokrasi, karena adanya keterikatan inilah yang dapat mempengaruhi aspek partisipasi politik di negara berkembang. Selain itu aspek ekonomi merupakan sebuah salah satu faktor yang dijadikan sebagai masyarakat berkembang untuk turut aktif dalam partisipasi, maka dari itu individu yang memiliki ekonomi lebih pada negara berkembang selalu menjadi acuan dalam menentukan keputusan dan sikap politik.

### 1.5.3 Kerangka Teori

#### Ekonomi Politik Neoklasik

Aliran neoklasik muncul karena tidak tercapainya pasar yang efektif dalam aliran klasik dan merupakan sebuah respon dari kritikan aliran Marxisme. Dimana aliran Marxisme melihat bahwa perekonomian tidak berjalan dengan mulus seperti yang diperkirakan oleh kaum klasik. Dalam hal ini pakar ekonomi neoklasik, menyetujui hal yang dikritik oleh kaum Marxisme, dimana pasar tidak dapat lepas dari peran negara atau pemerintah. Tetapi kaum neoklasik lebih tidak setuju lagi jika mekanisme pasar diabaikan dan segala sesuatu serba diatur oleh pemerintah. Menurut pakar neoklasik dalam Deliarnov (2006:54)<sup>9</sup>, untuk mengatasi kelemahan dan ketidaksempurnaan pasar, seharusnya memang ada campur tangan negara atau pemerintah, tetapi pemerintah hanya untuk memperbaiki distorsi yang terjadi di pasar, bukan untuk menggantikan fungsi mekanisme pasar.

---

<sup>8</sup> Huntington, Samuel. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal 60-61.

<sup>9</sup> Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta : Erlangga Halaman 54

Ekonomi dipandang sebagai proses dimana orang berusaha memaksimalkan pemenuhan terhadap kebutuhan berdasarkan sumber daya yang ada. Proses ini dianggap terjadi di dalam institusi-institusi politik. Orang yang membuat kontrak dalam kapasitas pribadi dan orang yang terlibat dalam tindakan politik, keduanya berusaha memuaskan kebutuhan mereka semaksimal mungkin. Maka tujuan dari tindakan ekonomi maupun tindakan politik, yaitu samasama untuk mencapai penghematan (*economizing*), dalam hal ini melakukan penekanan biaya dengan mencapai pemaksimalan sumber daya. Tentunya dalam pasar, transaksi dilakukan secara sukarela. Kesukarelaan tersebut dapat tercapai ketika adanya kepentingan yang sama antara kedua belah pihak atau lebih. Menurut Caporaso (2015:201)<sup>10</sup>, ketika perjanjian dibuat secara sukarela dan tidak ada faktor yang dapat menghambat peningkatan kesejahteraan dalam transaksi, dan konsekuensi yang ada hanya berdampak pada pihak yang terlibat dalam perjanjian, sehingga interaksi pasar memungkinkan individu untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang yang tersedia untuk meningkatkan level kepuasan mereka.

Melihat dari cara pandang diatas, terdapat dua jenis agenda politik. Pertama, agenda politik yang berusaha untuk mengamankan atau mempertahankan sistem hak kepemilikan agar transaksi bisa terjadi secara sukarela. Kedua, agenda politik yang terkait dengan pihak yang tidak ikut dalam perjanjian tetapi terpengaruh oleh perjanjian tersebut, dimana dengan adanya pihak lain tersebut, potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dapat terganggu atau mungkin tidak dapat dicapai. Ilmu ekonomi politik dengan pendekatan neoklasik ialah mempertimbangkan masalah kegagalan pasar, dimana dalam aliran neoklasik lebih menekankan pada aspek ekonomi ketimbang aspek politik, jadi dengan kata lain bahwa aspek politik diperlukan jika pasar mengalami kegagalan. Ekonomi politik neoklasik menelaah situasi dimana pasar tidak berhasil

---

<sup>10</sup> James A Caporaso dan David P Levine, *Teori-teori Ekonomi Politik*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Oktober 2015.

Dalam teori neoklasik mengasumsikan bahwa tindakan konsumsi terhadap berbagai barang yang berbeda semuanya sama-sama menghasilkan satu dampak yang sama, yaitu kepuasan (*satisfication*) atau kegunaan (*utility*) bagi konsumen (Caporaso dan Levine, 2008: 187)<sup>11</sup>. Pilihan atau tindakan pelaku ekonomi harus berdasarkan tujuan yang mengandung kepuasan dan kegunaan, yang dimaksudkan kegunaan setiap barang adalah tiap-tiap individu dalam memenuhi kepuasan tentunya berbeda hal inilah yg dimaksudkan bahwa tiap-tiap barang juga memiliki kegunaan yang berbeda.

Terkadang dalam pemenuhan kebutuhan juga dihadapkan dengan masalah kelangkaan. Kelangkaan dapat terjadi dalam dua kondisi, yang pertama kondisi subjektif yaitu individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan juga bisa disebabkan karena kondisi objektif atau minimnya ketersediaan barang atau sumber daya. Ini membuat penerapan perilaku penghematan (*economizing behaviour*), dimana semua pilihan harus dilakukan secara rasional dan seefisien mungkin.

### **Struktur dari Teori Neoklasik**

Struktur Teori Neo-klasik antara lain

- Hak Kepemilikan
- Eksternalitas
- Public Goods
- Oligopoli

#### 1. Hak Kepemilikan

Hak kepemilikan merupakan bagian penting dari analisis neoklasik. Dalam pandangannya hak kepemilikan bukanlah sebuah bagian dari kegiatan ekonomi. Melainkan sebuah bagian dari sebuah sistem hukum, yang dilindungi guna maksimalisasi kepuasan yang rasional. Hal itu kemudian diatur agar hak-hak

---

<sup>11</sup> Coporaso, James dan David Levine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. Hal 187

kepemilikan memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Artinya kebebasan dalam memilik tidak boleh sampai bersinggungan dengan kebebasan orang lain.

Mengenai pandangan mengenai hak kepemilikan terhadap politik, sebenarnya ada dua teori yang membicarakan hal tersebut. Yang pertama, teori positivis menyebutkan bahwa hak kepemilikan tercipta karena sebuah proses politik dan oleh karenanya yang memiliki sifat yang sama maka hak kepemilikan dapat diganggu-gugat sama dengan proses politik yaitu melewati pengadilan. Yang kedua, adalah teori naturalis, artinya hak kepemilikan tidak didapat melalui proses politik melainkan hak itu sudah diperoleh sejak seseorang dilahirkan dan hak tersebut merupakan konsep dasar dari manusia yang beradap. Hak tersebut juga mempunyai peranan yang penting dalam proses politik meskipun kedudukannya tidak bersifat politis.

## 2. Eksternalitas

Transaksi yang dilakukan secara sukarela adalah syarat mutlak dalam konsep neoklasik tentang interaksi antar manusia. Transaksi secara sukarela adalah bentuk yang paling mendasar dari sebuah hubungan antar manusia karena alasan alasan tertentu. Status tinggi yang didapatkan oleh transaksi seperti ini berasal dari ide bahwa kehidupan manusia adalah maksimalisasi terhadap kebutuhan pribadi dalam konteks keterbatasan sumber daya. Transaksi secara sukarela, serta asumsi bahwa setiap orang selalu tahu apa yang ia inginkan. Secara logis akan membawa kita pada kesimpulan tentang optimalitas pasar.

Tapi sayangnya, pasar bebas tidaklah selalu optimal bahkan ketika diukur menurut standar standar dalam pendekatan neoklasik sendiripun. Alasan pertama karena teorema dari hubungan pasar bebas dengan maksimalisasi kekayaan mengasumsikan bahwa orang yang tidak terlibat dalam sebuah kontrak yang dibuat beberapa orang lain tidak akan mendapatkan pengaruh apapun dari kontrak itu. Eksternalitas merujuk ada beberapa dampak dari transaksi yang menimpa orang-orang yang bukan bagian dari transaksi itu. Jika transaksi benar-benar bisa menghasilkan dampak terhadap orang lain yang tidak terlibat dalam transaksi

tersebut, maka dari itu bahwa transaksi itu belum tentu bisa meningkatkan kesejahteraan. Apa sebenarnya yang dimaksud eksternalitas? Eksternalitas adalah “dampak (dari transaksi –pent) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi – pent) yang tidak melewati system harga dan muncul sebagai efek samping yang tidak disengaja dari kegiatan orang lain atau kegiatan perusahaan lain” (Rhoads 1985:113).

Hubungan teoritis antara eksternalitas dengan Negara. Ini bisa di mulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama mengapa eksternalitas sebaiknya tidak terjadi? Kedua apa masalah yang di timbulkan oleh eksternalitas bagi pendepatan neoklasik? Pertanyaan tersebut di jawab dengan perspektif keadilan social, yaitu bahwa jika eksternalitas terjadi, maka akan ada orang lain yang menerima keuntungan atau harus mengeluarkan biaya untuk urusan urusan yang terjadi bukan atas kehendak mereka sendiri. Dalam ilmu ekonomi neoklasik sendiri memiliki alasan, bahwa eksternalitas dapat mengganggu efisiensi dari operasi dalam perekonomian. Contoh eksternalitas negative yang di timbulkan oleh perusahaan, seperti polusi yang menimbulkan biaya atau kerugian bagi pihak pihak di luar perusahaan dalam bentuk gangguan kesehatan dan biaya pengobatan.

Teori neoklasik mengatakan bahwa perusahaan akan menaikkan level produksi sampai biaya dari penambahan output, atau biaya marginal, menjadi sama dengan harga yang digunakan untuk menjual output itu, jika biaya marginal ini lebih tinggi dari pada harga, maka menjual lebih banyak output justru akan menelan biaya yang lebih tinggi daripada pendapatan yang diterima dari harga jual, sehingga produsen justru merugi. Tetapi selama biaya marginal masih lebih rendah daripada harga jual, perusahaan bisa menaikkan laba dengan memproduksi lebih banyak. Jika kita menganggap bahwa harga produk sudah di patok (given) dan di asumsikan bahwa return yang didapatkan mengalami penurunan sepanjang waktu (diminishing return), barulah kita dapat melihat dengan mudah bagaimana eksternalitas menghasilkan level produksi yang tidak efisien.

### 3. Public Goods

Peran penting dari Public Goods melibatkan banyak level dari kegiatan pemerintah, mulai dari masalah sanitasi dan aturan lalu lintas untuk level pemerintah local sampai pada kebijakan pertahanan Negara pada level Internasional. Alasan mengapa barang public diproduksi dalam level yang terlalu rendah ini adalah karena pasar hanya mau memproduksi barang-barang yang memungkinkan produsennya untuk bisa mendapatkan keuntungan. Ketika barang-barang ini selesai diproduksi, barang-barang ini langsung masuk dalam wilayah public. Dan memang salah satu definisi dari public adalah barang yang begitu diproduksi untuk anggota tertentu dari sebuah kelompok akan secara otomatis bisa digunakan oleh semua anggota dalam kelompok itu. Definisi ini menunjukkan pentingnya sifat non-eksklusif (terbuka bagi semua orang) dalam Public Goods.

Sifat umum dari Public Goods adalah sifat non-eksklusif dan non-rival (tidak bersaing dan tidak menyaingi) Hubungan antara barang public dengan ekonomi politik, barang public adalah tema yang menarik. Karena barang public menunjukkan batas-batas dari model pasar sempurna yang terdiri dari pelaku-pelaku yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Alasan-alasan mengapa barang-barang Public Goods tidak dapat diproduksi oleh pasar dan kelemahan pasar ini mendorong orang untuk beralih ke politik. Masalah yang menghambat penciptaannya barang-barang publik.

Masalah yang menghambat penciptaan barang-barang public pada level mikro-ekonomi bahwa individu tidak menginvestasikan energy dan sumber daya untuk memproduksi barang-barang public itu karena individu yang melakukan investasi semacam itu tidak bisa mendapatkan semua keuntungan yang bisa diberikan oleh barang public itu. Untuk level makro-ekonomi, kesulitan pasar untuk memproduksi barang public ini terjadi karena biaya dan keuntungan dari individu tidak dapat dihubungkan dengan biaya dan keuntungan sosial yang dihasilkan barang public itu. Seperti yang ditunjukkan oleh Shitglitz, kekurangan

pada barang public ini adalah sebuah bentuk inefisiensi yang dapat menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi (Stiglitz 1988:75)<sup>12</sup>

Fakta bahwa pasar tidak dapat menghasilkan barang public tidaklah terlalu berarti bahwa pemerintah pasti bisa menyediakannya. Selain itu, penyediannya barang public memerlukan kerja tim, sehingga di dalamnya juga akan terjadi masalah tindakan kolektif. Negara-negara pada posisi lebih baik untuk mengatasi masalah-masalah ini karena Negara punya kewenangan untuk menggunakan koersi (kekerasan , paksaan ) untuk memaksa setiap individu-individu untuk melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan bersama ( yaitu memaksa mereka untuk membayar agar bisa mendapatkan keuntungan dari Public Goods). Selain itu pemerintah adalah lembaga yang lebih kuat sentralisasinya daripada pasar sehingga memungkinkan Negara untuk mengatasi masalah-masalah koordinasi dalam pengambilan keputusan yang desentralisasi.

#### 4. Oligopoli

Pasar dengan persaingan sempurna adalah yang memiliki penjual dan pembeli dalam jumlah besar. Ukuran kekayaan dari tiap-tiap produsen dan konsumen sangat kecil jika dibandingkan dengan total yang ada di dalam pasar, sehingga tiap-tiap satu pelaku tidak dapat mempengaruhi kondisi agregat dari pasar, terutama harga. Pilihan yang bisa dibuat tiap-tiap pelaku adalah sebatas apa yang akan mereka produksi. Ketika perusahaan dalam sebuah pasar menjadi terbatas kemampuannya seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa pasar berfungsi sebagaimana mestinya. Beberapa ilmuwan (seperti Lindblom 1977) mengajukan sanggahan bahwa perekonomian industrial tidak sesuai dengan deskripsi tentang pasar yang persaingannya sempurna.

Oligopoli dikatakan terjadi ketika beberapa perusahaan mengendalikan sebagian besar dari pasar atau aset dalam pasar untuk sebuah sektor tertentu.

---

<sup>12</sup> Stiglitz, Joseph E. 1988. *"Tax Reform: Theory and Practice."* In *The Economics of Tax Reform*, Bassam Harik, ed. Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research

Perusahaan hanya bisa mengatur parameter-parameter utama dalam pasar, seperti misalnya harga. Perusahaan-perusahaan dalam oligopoli bisa menentukan atau menetapkan level harga lebih tinggi dibandingkan dengan level harga yang bisa terbentuk dalam persaingan sempurna. Selain menaikkan harga, perusahaan dalam oligopoly juga bisa membatasi output, karena mereka sudah mendapatkan laba yang tinggi dengan menjual produk yang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi. Dari sudut pandang efisiensi, skenario di atas akan dirasa memperhatikan. Perusahaan akan menghasilkan “terlalu sedikit” tapi meminta harga yang “terlalu tinggi” jika dibandingkan dengan standar berupa kondisi dalam persaingan sempurna. Individu – individu dan perusahaan-perusahaan yang hanya mampu membeli dengan harga yang lebih rendah akan menjadi tersingkir dari pasar. Kepuasan atau kegunaan (utility) akan menurun. Dalam situasi ini, harga tidak mencerminkan biaya produksi dan kelangkaan sumber daya tidak teralokasikan dengan efisien.

Dalam situasi dimana ada eksternalitas dan barang public, pasar tetap mengalami kegagalan ketika kondisi persaingannya sudah ideal. Di dalam oligopoly, kegagalan di tengah kesempurnaan ini masih diperparah lagi oleh inefisiensi yang disebabkan oleh terkikisnya tingkat persaingan dalam pasar itu sendiri. Namun yang sama antara kondisi eksternalitas dan barang public dengan kondisi oligopoly adalah bahwa sama-sama ada alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. perekonomian menjadi terhambat kemampuannya untuk bisa mengalokasikan sumber daya secara efisien. Pemerintah bisa melakukan intervensi untuk memecah perusahaan-perusahaan yang lebih besar ini menjadi perusahaan-perusahaan kecil agar mencegah terjadinya kolusi antara perusahaan besar untuk menetapkan harga seenaknya sendiri dan untuk menghalangi terjadinya merger-merger yang bisa menghambat persaingan

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Fokus Penelitian**

Penelitian ini fokus pada pengkajian tentang transformasi pengusaha menjadi politisi, dampak yang diberikan setelah menjadi politisi, dan tujuan sebenarnya para pengusaha yang ingin dicapai setelah bertransformasi menjadi politisi.

### **1.6.2 Tipe Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan analisa deskriptif yakni suatu model penelitian yang berusaha menjelaskan serta menggambarkan fenomena yang ada atau menggambarkan fenomena yang telah terjadi sebelumnya. Metode deskriptif tertuju pada bagaimana cara memecahkan suatu masalah yang ada pada saat ini dan model ini berusaha untuk menggambarkan, menganalisa, dan mengklarifikasi. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala yang terjadi secara apa adanya saat penelitian dilakukan. Dalam artian lain penelitian ini hanya sekedar menggambarkan saja, akan tetapi juga berusaha menjelaskan kenapa fenomena tersebut bisa terjadi, apa penyebabnya, pengaruh, karena apa dan sebagainya. Tanpa harus membuang hasil penelitian secara empirik. Penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, intepretasi data, dan kesimpulan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan penelitian yang telah dicantumkan dalam rumusan masalah serta identifikasi masalah. Selain itu, penelitian metode ini juga akan memberikan pedoman kepada peneliti bagaimana cara mengumpulkan data, lalu data itu diolah dan diidentifikasi serta analisis. Pengumpulan data biasanya juga mencari data primer maupun sekunder untuk mendukung hasil penelitian atau menjawab rumusan masalah.

### **1.6.3 Subyek Penelitian**

Subyek Penelitian berkaitan dengan informan atau narasumber yang dimana peneliti berharap narasumber atau informan bisa memberikan informasi data secara lengkap dan detail terkait masalah penelitian. Peneliti menetapkan subyek yang berkaitan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Vinsesius Awey anggota DPRD Kota Surabaya
2. Hermawan Setyo Partai Nasdem
3. H. Mahdi, S.E., S.H. Wakil Ketua komisi D DPRD Jatim

#### **1.6.4 Teknik Analisis Data**

Dalam proses analisis data peneliti akan mulai memutar rekaman suara yang telah dilakukan dalam proses wawancara yang kemudian dibuat transkrip agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Selain itu, peneliti juga akan mengkategorikan data dengan tujuan agar memudahkan peneliti menyesuaikan dengan konteks yang dibahas dan juga akan membuat abstraksi.

Alasan penggunaan metode kualitatif adalah: pertama, lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat peneliti subjek penelitian. Teknik analisis data ini bertujuan untuk menyusun data agar tersusun rapi, dimana di mulai wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta kumpulan bahan-bahan yang di dapat untuk menunjang penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dari subjek penelitian yaitu Setelah melakukan pengumpulan data selanjutnya peneliti akan melakukan reduksi data yang dimana yaitu memilih dan memilah data mana yang cocok untuk disajikan dalam pembahasan akhir atau laporan akhir penelitian. Setelah mereduksi data tersebut peneliti selanjutnya akan menarik kesimpulan dari verifikasi-verifikasi data yang sebelumnya sudah diolah oleh peneliti.